

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nurnaida Abdullah ^{1,*}; M. Nur Alamsyah ²; Angga Pradana ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; nunaa424@gmail.com

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; alamsyah_sip2000@yahoo.com

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; anggadana93@gmail.com

*Correspondence : nunaa424@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *kebijakan pemberdayaan, masyarakat nelayan, Morowali Utara, pemberdayaan masyarakat, Kolonodale..*

Received : Juni 2026

Revised : Juni 2026

Accepted : Juni 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, yang masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kolonodale dengan penentuan informan melalui teknik *purposive sampling*. Informan penelitian berjumlah tiga kelompok utama, yaitu Kepala Dinas Perikanan Daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan belum berjalan secara optimal. Pada aspek *Enabling*, mekanisme musyawarah masih cenderung didominasi oleh nelayan yang memiliki modal lebih besar sehingga partisipasi nelayan kecil belum maksimal. Pada aspek *empowering*, bantuan yang diberikan masih berfokus pada bantuan fisik dan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik nelayan. Sementara itu, pada aspek *Maintaining*, perlindungan terhadap harga hasil tangkapan dan tata niaga perikanan masih lemah sehingga nelayan kecil tetap rentan terhadap eksploitasi tengkulak. Selain itu, ditemukan adanya kelompok nelayan yang tidak lagi aktif karena sebagian anggotanya telah beralih profesi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di tingkat lokal serta menunjukkan pentingnya penguatan partisipasi, ketepatan sasaran program, dan perlindungan ekonomi nelayan guna mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

ABSTRACT:

This study aims to describe the implementation of fishermen community empowerment policies in Kolonodale, North Morowali Regency, which continue to face various challenges in improving the welfare and independence of fishermen. This research employed a descriptive qualitative approach conducted in Kolonodale, with informants selected through purposive sampling. The informants consisted of representatives from the Regional Fisheries Office, local

government, and fishermen communities. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results indicate that the implementation of fishermen community empowerment policies has not been optimal. In the Enabling aspect, decision-making forums tend to be dominated by fishermen with greater financial resources, limiting the participation of small-scale fishermen. In the empowering aspect, assistance programs are primarily focused on physical aid and are often not aligned with the specific needs of fishermen. Meanwhile, in the Maintaining aspect, protection of fishery product prices and marketing systems remains inadequate, leaving small-scale fishermen vulnerable to exploitation by middlemen. In addition, several fishermen groups have become inactive as some members have shifted to other occupations. This study contributes to a better understanding of the implementation of fishermen empowerment policies at the local level and highlights the importance of strengthening participation, improving the accuracy of assistance programs, and enhancing economic protection for fishermen to achieve sustainable empowerment and improve the welfare of coastal communities.

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan strategi penting dalam pembangunan wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Nelayan sebagai kelompok yang bergantung pada sektor perikanan sering menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang membuat mereka berada pada posisi rentan. Di Kecamatan Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari keterbatasan internal seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan akses teknologi perikanan, tetapi juga tekanan eksternal berupa persaingan dengan kapal perikanan besar serta berkembangnya industri pertambangan nikel yang mendorong sebagian nelayan beralih profesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius agar mereka mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan sosial ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 sebagai dasar hukum perlindungan dan pemberdayaan petani serta nelayan, yang mencakup penyediaan sarana prasarana, kepastian usaha, perlindungan harga, asuransi, bantuan hukum, serta program pemberdayaan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemasaran, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan. Namun, secara empiris implementasinya belum optimal. Nelayan masih menghadapi keterbatasan sarana, ketidakpastian harga, minimnya akses pelatihan dan pendampingan, serta lemahnya perlindungan tata niaga. Selain itu, pengambilan keputusan dalam kelompok nelayan cenderung didominasi oleh pemilik modal besar sehingga aspirasi nelayan kecil kurang terakomodasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengembangkan potensi, memenuhi kebutuhan secara mandiri, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Margayaningsih, 2018). Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 menegaskan pemberdayaan sebagai strategi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberhasilan program pemberdayaan ditentukan oleh prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan keberlanjutan (Purnamasari and Ma'ruf, 2020). Dalam perspektif lain, pemberdayaan mencakup tiga dimensi utama yaitu *Enabling*, *empowering*, dan *Maintaining*, yang masing-masing berfokus pada penciptaan kondisi yang mendukung, penguatan kapasitas, serta keberlanjutan hasil pemberdayaan (Lubys, Rares and Plangiten, 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan nelayan sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Penelitian (Mamentu, 2015) menemukan bahwa program pemberdayaan nelayan belum optimal karena fokus pada bantuan fisik, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi. Penelitian (Manaf, 2021) menunjukkan bantuan alat tangkap seperti gill net nilon berdampak positif pada pendapatan nelayan, meskipun tidak merata. Sementara itu, (ARDANI, 2023) menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas, pelatihan, teknologi, serta lemahnya kemitraan dan ketergantungan pada tengkulak masih menjadi kendala utama. Penelitian (Tahir, 2021) juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti lantai jemur dan tambahan perahu membantu aktivitas nelayan, meskipun masih perlu penguatan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Kolonodale Kabupaten Morowali Utara berdasarkan dimensi *Enabling*, *empowering*, dan *Maintaining*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala yang ada, serta menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kolonodale dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi nyata serta dinamika sosial masyarakat nelayan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap informan yang ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini

meliputi Kepala Dinas Perikanan Daerah, Kepala Desa Ganda-Ganda, Sekretaris Kelurahan Bahoue, Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Kuda Laut, serta anggota kelompok masyarakat nelayan, dengan total 5 (lima) informan. Adapun inisial informan adalah sebagai berikut: PL (Kepala Dinas Perikanan Daerah), HA (Kepala Desa Ganda-Ganda), R (Sekretaris Kelurahan Bahoue), G (Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Kuda Laut), dan N (Anggota Kelompok Masyarakat Nelayan).

Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara *semi-structured interview* agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan fleksibel sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, *observation* dilakukan dengan mengamati aktivitas masyarakat nelayan, bentuk-bentuk pemberdayaan yang berlangsung, serta peran pemerintah dalam implementasi kebijakan pemberdayaan tersebut.

Data sekunder diperoleh melalui teknik *documentation*, berupa pengumpulan dan penelaahan dokumen kebijakan, laporan kegiatan pemberdayaan nelayan, data statistik kelautan dan perikanan, arsip administrasi, serta dokumentasi foto kegiatan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan *data condensation*, *data display*, serta *conclusion drawing/verification*, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

Hasil

1. *Enabling* pada Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Enabling didefinisikan sebagai penciptaan iklim atau lingkungan yang kondusif agar potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa setiap individu dan komunitas memiliki potensi intrinsik yang perlu dikembangkan, sehingga menolak anggapan adanya masyarakat yang sama sekali tidak berdaya (nirdaya). Dengan demikian, proses peningkatan motivasi dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penumbuhan ketertarikan, penguatan kesadaran, dan pengembangan motivasi masyarakat dalam membangun kapasitas diri dan kelompok (Susilowati, Suharma and Nainggolan, 2025).

Tahap *Enabling* merupakan pilar awal dalam pemberdayaan yang bertujuan menghilangkan hambatan struktural dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat nelayan dalam mengembangkan usaha. Di Kolonodale, hal ini tercermin melalui peran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, khususnya Dinas Perikanan Daerah, dalam menyediakan infrastruktur Pelabuhan Perikanan Kolonodale dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Fasilitas ini mengatasi keterbatasan akses pasar dan logistik sehingga nelayan tidak lagi bergantung pada sistem penjualan yang tidak terstandarisasi.

Selain itu, kebijakan *Enabling* juga diwujudkan melalui bantuan modal fisik seperti perahu bermesin kepada kelompok nelayan sebagai stimulus ekonomi awal. Intervensi ini bertujuan mengatasi keterbatasan modal dan alat produksi yang

menjadi penyebab utama kemiskinan struktural, sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan sebelum memasuki tahap *empowering*. Pemerintah Kolonodale juga menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian nelayan melalui bantuan bibit ikan, perahu, dan alat tangkap.

Partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan menjadi aspek penting dalam implementasi program. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Daerah Morowali Utara, pemerintah melalui Dinas Perikanan dan pemerintah desa/kelurahan mengundang perwakilan nelayan dalam forum Musrenbang Desa untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung. Hal ini menunjukkan mekanisme partisipasi berbasis *bottom-up* yang memungkinkan aspirasi nelayan terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai skema seperti APBD, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk memperkuat ekonomi nelayan dan mengatasi keterbatasan modal usaha. Terkait penyebaran informasi, Sekretaris Kelurahan Bahoue menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung di TPI atau balai pertemuan serta melalui grup *WhatsApp* untuk mempercepat distribusi informasi. Strategi ini mencerminkan kombinasi komunikasi langsung dan digital agar informasi program menjangkau seluruh nelayan. Meskipun demikian, partisipasi nelayan masih menghadapi kendala keterbatasan waktu karena prioritas melaut, sehingga sebagian tetap tidak mengikuti pertemuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Enabling* secara struktural belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesadaran partisipatif.

Selain itu, waktu pelatihan disesuaikan dengan musim angin yang tidak memungkinkan nelayan melaut. Berdasarkan wawancara dengan nelayan, periode tersebut menjadi waktu yang paling memungkinkan untuk mengikuti kegiatan, meskipun sebagian memilih beristirahat sehingga diperlukan pendekatan motivasional yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Enabling* di Kolonodale telah berjalan melalui penyediaan infrastruktur, modal, dan akses informasi. Namun, tantangan utama masih terletak pada ketimpangan partisipasi, di mana nelayan bermodal besar lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tujuan pemerataan pemberdayaan belum sepenuhnya tercapai.

2. *Empowering* dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Tahap *empowering* merupakan inti kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kolonodale, dengan pergeseran fokus dari penyediaan fasilitas fisik (*enabling*) menuju penguatan kapasitas internal. Secara kelembagaan, proses ini dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Dinas Perikanan Daerah sebagai fasilitator peningkatan keterampilan teknis dan manajerial. Pada aspek teknis, nelayan dibina dalam metode penangkapan dan budidaya berkelanjutan serta penanganan pascapanen yang higienis untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan.

Pada aspek manajerial, penguatan mencakup organisasi kelompok, pengelolaan keuangan sederhana, dan akses permodalan untuk mendorong transformasi dari nelayan subsisten menjadi pelaku usaha mandiri.

Partisipasi nelayan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Hal ini ditegaskan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Daerah Morowali Utara yang menyatakan bahwa *“partisipasi nelayan penting agar kebutuhan mereka dapat diketahui dalam penyusunan program peningkatan hasil tangkapan”* (wawancara 26 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi berfungsi sebagai umpan balik dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemberdayaan juga dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga pelaksanaan program (Solihati *et al.*, 2026), sehingga potensi lokal dapat dioptimalkan secara lebih efektif.

Dukungan pemerintah mencakup penguatan ekonomi dan perlindungan sosial melalui bantuan sarana produksi serta program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Dinas Perikanan Daerah bahwa *“bantuan berupa perahu dan mesin disertai perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan”* (wawancara 26 Agustus 2025). Kondisi ini mencerminkan dua pilar *empowering*, yaitu penguatan produksi dan mitigasi risiko.

Pemerintah desa juga berperan melalui Musyawarah Desa (*Musdes*) sebagai ruang aspirasi masyarakat. Kepala Desa Ganda-Ganda menyatakan bahwa *“Musdes digunakan untuk menyeimbangkan berbagai usulan agar masuk dalam program desa”* (wawancara 26 Agustus 2025), sehingga aspirasi nelayan dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan partisipasi dalam kelompok nelayan. Salah satu nelayan menyebutkan bahwa *“nelayan kecil sering kalah suara dibandingkan nelayan bermodal besar atau yang memiliki kedekatan dengan aparat”* (wawancara 29 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi belum sepenuhnya adil dan masih dipengaruhi relasi kuasa.

Ketimpangan tersebut berdampak pada distribusi bantuan yang belum merata, sehingga tujuan pemberdayaan belum optimal. Selain itu, nelayan juga menghadapi kendala cuaca tidak menentu, keterbatasan alat tangkap, dan rendahnya harga ikan akibat dominasi tengkulak, yang dinyatakan sebagai *“cuaca tidak menentu dan harga ikan yang rendah menjadi masalah utama”* (wawancara 29 Agustus 2025). Secara keseluruhan, implementasi *empowering* di Kolonodale masih belum merata. Program cenderung menitikberatkan pada bantuan fisik, sementara penguatan keterampilan dan perubahan perilaku masih terbatas, sehingga kemandirian dan peningkatan pendapatan nelayan kecil belum optimal.

3. *Maintaining* dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Maintaining, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat (Suherman *et al.*, 2024). Proses perencanaan pembangunan dilakukan secara inklusif melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) berjenjang. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah Morowali Utara yang menyatakan bahwa “*perencanaan dilakukan dari bawah melalui Musrenbang agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat secara langsung*” (wawancara 26 Agustus 2025). Mekanisme ini memastikan aspirasi nelayan terserap dalam kebijakan, termasuk kebutuhan alat tangkap, fasilitas penyimpanan dingin (*cold storage*), dan program Bantuan Keuangan Khusus (*BKK*).

Untuk menjamin akuntabilitas, Dinas Perikanan melakukan monitoring berkala sebagai bentuk pengawasan program. Hal ini menunjukkan adanya sistem respons cepat terhadap laporan masyarakat yang berfungsi memastikan efektivitas implementasi pemberdayaan. Selain itu, pemerintah kelurahan turut memperkuat kelembagaan nelayan melalui pelatihan organisasi dan kepemimpinan. Sekretaris Kelurahan Bahoue menyatakan bahwa “*pelatihan manajemen organisasi dilakukan untuk mendorong kemandirian kelompok nelayan*” (wawancara 28 Agustus 2025). Upaya ini bertujuan memperkuat kemampuan internal agar kelompok nelayan dapat mengelola organisasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagian nelayan telah menerapkan pengelolaan keuangan secara disiplin. Salah satu nelayan menyebutkan bahwa “*hasil melaut dicatat terpisah dan sebagian keuntungan disisihkan untuk dana perbaikan kapal*” (wawancara 29 Agustus 2025). Hal ini menunjukkan adanya kemampuan *self-maintenance* dalam menjaga keberlanjutan usaha. Namun demikian, secara kelembagaan fungsi perlindungan masih belum optimal. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perikanan memang bertugas menjaga sumber daya dan melindungi nelayan kecil, tetapi dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan partisipasi. Salah satu nelayan menyatakan bahwa “*nelayan kecil sering kalah suara dibandingkan nelayan bermodal besar*” (wawancara 29 Agustus 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan internal belum berjalan efektif.

Selain itu, nelayan juga masih menghadapi tekanan dari tengkulak, fluktuasi harga ikan, serta persaingan dengan kapal besar yang menunjukkan lemahnya perlindungan pasar (*market protection*). Hal ini membuat keberdayaan yang telah dibangun melalui *enabling* dan *empowering* masih rentan. Secara keseluruhan, dimensi *Maintaining* di Kolonodale belum optimal. Meskipun terdapat upaya monitoring, pelatihan, dan penguatan kelembagaan, perlindungan terhadap nelayan kecil masih lemah sehingga keberlanjutan hasil pemberdayaan belum sepenuhnya terjamin.

Pembahasan

1. Peran Pemerintah dalam Menciptakan Lingkungan Pendukung bagi Kemandirian Nelayan

Konsep *enabling* dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kolonodale merujuk pada upaya penciptaan iklim yang kondusif agar potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan merupakan proses yang menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan kemampuan, akses, dan kontrol terhadap sumber daya sehingga masyarakat tidak diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam pembangunan (Pratiyudha *et al.*, 2022).

Dalam perspektif yang lebih luas, (Lingkoa, Sasterio and Pradana, 2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa pada elemen *Culture*, nilai gotong royong masyarakat masih menjadi kekuatan utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa,

meskipun masih terdapat hambatan berupa adaptasi teknologi yang rendah serta praktik nepotisme. Pada elemen *Capabilities*, aspek *Think Ahead* belum sepenuhnya diiringi dengan perencanaan yang matang, sementara *Think Again* terhambat oleh rendahnya kapasitas aparatur desa, dan *Think Across* masih lemah akibat minimnya kolaborasi lintas pihak. Sementara itu, pada elemen *Change*, pemanfaatan teknologi sudah mulai diterapkan, namun efektivitasnya masih rendah karena partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh (Wahida, Hartawan and Mahfuzat, 2025) menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola pemerintahan juga terjadi dalam konteks distribusi bantuan sosial di Desa Bahoruru. Penelitian tersebut mengungkap fenomena ketidaktepatan sasaran bantuan beras miskin yang mencerminkan lemahnya efektivitas program sosial dan tata kelola pemerintahan desa. Kondisi ini ditandai dengan masih adanya keluarga yang tidak berhak menerima bantuan, yang mengindikasikan lemahnya pendataan, verifikasi, serta mekanisme distribusi bantuan.

Temuan (Rifaldi, Rusdin and Mahfuzat, 2026) ini memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, serta kapasitas aktor dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut juga tercermin dalam konsep *enabling*, di mana keberhasilan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kolonodale tidak hanya ditentukan oleh penyediaan fasilitas dan akses sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan aktor-aktor terkait dalam membangun sinergi, menyamakan pemahaman, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat lapangan.

Dalam konteks empiris di Kolonodale, implementasi *enabling* terlihat melalui peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti Pelabuhan Perikanan Kolonodale dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kehadiran infrastruktur ini berfungsi mengurangi hambatan struktural yang selama ini dihadapi nelayan kecil, khususnya dalam aspek akses pasar dan distribusi hasil tangkapan. Selain itu, bantuan sarana produksi seperti perahu bermesin juga menjadi bentuk intervensi awal untuk memperkuat kapasitas ekonomi nelayan.

Secara analitis, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi *facilitator* dalam pemberdayaan, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk bergerak menuju kemandirian. Namun, *enabling* tidak hanya berhenti pada penyediaan sarana fisik, melainkan juga mencakup aspek sosial seperti akses informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan penguatan kapasitas individu.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi melalui Musrenbang Desa telah membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan nelayan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi tersebut masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan (*equal participation*), karena dominasi aktor tertentu masih terjadi dalam proses pengambilan keputusan kelompok nelayan.

Selain itu, strategi penyebaran informasi melalui kombinasi pertemuan tatap muka dan media digital seperti WhatsApp menunjukkan adanya adaptasi terhadap

karakteristik sosial nelayan yang mobile. Strategi ini memperkuat jangkauan informasi, terutama bagi kelompok yang sulit terlibat secara langsung dalam forum formal.

Integrasi sumber pembiayaan melalui APBD, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperlihatkan adanya pendekatan *multi-financing system* dalam pemberdayaan. Sistem ini secara teoritis mampu memperluas akses modal, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada literasi keuangan dan kemampuan akses masyarakat nelayan itu sendiri.

Hambatan partisipasi tetap menjadi tantangan utama. Ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi harian (melaut) dan kegiatan pengembangan kapasitas menunjukkan adanya konflik antara kebutuhan jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kondisi ini menegaskan bahwa *enabling* struktural belum sepenuhnya diikuti oleh *enabling* kognitif dan motivasional.

Penjadwalan pelatihan pada musim angin atau *musim paceklik* merupakan bentuk adaptasi kebijakan yang cukup tepat. Namun, kecenderungan nelayan untuk memilih istirahat dibandingkan mengikuti pelatihan menunjukkan bahwa insentif non-material masih perlu diperkuat agar partisipasi dapat meningkat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi *enabling* di Kolonodale telah menciptakan fondasi awal pemberdayaan, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek pemerataan akses, dominasi aktor tertentu, serta rendahnya internalisasi manfaat program oleh masyarakat nelayan.

2. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Nelayan melalui Program Pemberdayaan

Konsep *empowering* dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dimaknai sebagai proses penguatan potensi yang telah dimiliki masyarakat melalui peningkatan keterampilan teknis, kapasitas manajerial, dan kemandirian dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Menurut (Noor, 2011), *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya

Dalam konteks Kolonodale, tahapan *empowering* menjadi inti dari kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan setelah tahap *enabling*. Jika *enabling* berfokus pada penciptaan kondisi awal, maka *empowering* diarahkan pada peningkatan kapasitas substantif masyarakat. Implementasinya dilakukan melalui Dinas Perikanan, khususnya Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil, yang berperan sebagai fasilitator peningkatan keterampilan dan pengetahuan nelayan.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, peningkatan kemampuan teknis seperti teknik penangkapan ikan yang lebih efektif, budidaya berkelanjutan, serta penanganan pascapanen yang higienis untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan. Kedua, penguatan kapasitas manajerial yang mencakup pengelolaan keuangan sederhana, penguatan kelembagaan kelompok nelayan, serta peningkatan akses terhadap permodalan. Melalui proses ini, nelayan diharapkan mampu bertransformasi dari pelaku ekonomi

subsisten menjadi pelaku usaha perikanan yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Namun demikian, penelitian (Syahwan, Mahfuzat and Lamading, 2026) juga menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, terutama pada aspek lingkungan seperti debu akibat aktivitas pertambangan dan kondisi perairan yang keruh yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan aspek sosial dan lingkungan agar manfaat yang dihasilkan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Penelitian oleh (Irawati, Pageno and Sisrilhardi, 2025) juga menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam keberhasilan suatu program pembangunan. Penelitian tersebut mengkaji tata kelola pengelolaan sampah di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang mengalami peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah cenderung bertindak secara responsif ketika terjadi kondisi darurat atau meningkatnya perhatian publik terhadap permasalahan sampah. Selain itu, regulasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 belum diimplementasikan secara optimal karena masih terbatasnya fasilitas pendukung, armada pengangkut sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program dan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana, ketersediaan sarana pendukung, dan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasinya.

Temuan (Mashita, Mahfuzat and Abdi, 2024) memiliki relevansi dengan konsep *empowering* dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kolonodale. Keberhasilan proses pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh bantuan fisik maupun peningkatan keterampilan individu, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor untuk membangun kerja sama, komunikasi, dan komitmen yang berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan nelayan, keterlibatan pemerintah, kelompok nelayan, serta pihak-pihak pendukung lainnya menjadi faktor penting dalam menciptakan proses penguatan kapasitas yang efektif. Oleh karena itu, sebagaimana pada pengelolaan wisata Paralayang Wayu, keberhasilan *empowering* juga memerlukan adanya kepercayaan, pemahaman bersama, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi aktif nelayan dipandang penting oleh Dinas Perikanan, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai sumber informasi langsung untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Partisipasi ini memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan riil nelayan, seperti jenis alat tangkap, bantuan sarana produksi, hingga pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil tangkapan.

Namun demikian, dalam praktiknya, *empowering* masih menghadapi sejumlah tantangan. Bantuan sarana produksi seperti perahu dan mesin memang meningkatkan kapasitas produksi, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan

keterampilan manajerial dan literasi usaha. Akibatnya, peningkatan produktivitas belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan nelayan. Selain itu, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah positif dalam mengurangi kerentanan (*vulnerability*) nelayan terhadap risiko kerja. Namun, aspek ini belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kapasitas adaptif nelayan dalam menghadapi fluktuasi harga dan risiko pasar.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa Musyawarah Desa (Musdes) telah menjadi ruang penting dalam proses penguatan aspirasi nelayan. Akan tetapi, ketimpangan kekuasaan dalam kelompok nelayan menyebabkan proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh nelayan bermodal besar, sehingga prinsip *equal participation* belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi *empowering* di Kolonodale masih bersifat parsial, karena lebih dominan pada aspek bantuan fisik dibandingkan penguatan kapasitas non-fisik seperti manajemen usaha, inovasi, dan kemandirian ekonomi.

3. Keberlanjutan dan Perlindungan dalam Penguatan Masyarakat Nelayan

Dimensi *maintaining* dalam teori pemberdayaan masyarakat menurut (Rakhmadian and Arif, 2023) *protecting* merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat. Tujuan utama dari dimensi ini adalah menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan yang telah dicapai sehingga kelompok sasaran mampu mempertahankan kemandirian dan tidak kembali berada dalam kondisi ketergantungan atau ketidakberdayaan. Dalam konteks masyarakat nelayan, *maintaining* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, pengawasan program, serta perlindungan terhadap ancaman eksternal yang dapat menghambat keberlanjutan usaha nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah mengimplementasikan dimensi *maintaining* melalui mekanisme perencanaan partisipatif yang diwujudkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) secara berjenjang mulai dari tingkat RT, dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat nelayan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka secara langsung dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Keberadaan *Musrenbang* mencerminkan penerapan pendekatan *bottom-up planning* yang memungkinkan kebijakan pemberdayaan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan keputusan pemerintah secara *top-down*. Dengan demikian, keberlanjutan program pemberdayaan dapat lebih terjamin karena masyarakat turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Selain melalui perencanaan partisipatif, dimensi *maintaining* juga diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah Morowali Utara. Monitoring yang dilakukan secara berkala pada triwulan keempat maupun melalui mekanisme respons cepat terhadap laporan masyarakat menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjaga efektivitas

program pemberdayaan. Kegiatan monitoring tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan penggunaan bantuan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan (*support and protection*) terhadap nelayan agar permasalahan yang muncul dapat segera ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan manfaat program sekaligus memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pada tingkat lokal, Kelurahan Bahoue juga berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan melalui pelatihan manajemen organisasi dan kepemimpinan kelompok nelayan. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok agar mampu mengelola organisasi secara mandiri, menyelesaikan konflik internal, serta meningkatkan kemampuan negosiasi dengan pihak luar. Upaya ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan. Sejalan dengan pendapat (Amali, Gani and Katili, 2022), pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran akan potensi lokal, serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.

Keberhasilan dimensi *maintaining* juga tercermin dari perubahan perilaku sebagian nelayan dalam mengelola keuangan usaha. Praktik pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyisihan dana cadangan untuk perbaikan alat tangkap, serta tabungan untuk investasi usaha menunjukkan adanya peningkatan kapasitas manajerial masyarakat nelayan. Perubahan perilaku tersebut merupakan indikator bahwa proses pemberdayaan telah menghasilkan kemandirian ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kemampuan nelayan dalam melakukan perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko mencerminkan terbentuknya mekanisme *self-maintenance*, yaitu kemampuan menjaga keberlangsungan usaha secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada bantuan pemerintah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi dimensi *maintaining* belum sepenuhnya optimal. Meskipun pemerintah telah melakukan pengawasan program dan penguatan kelembagaan, perlindungan terhadap nelayan dari tekanan pasar masih relatif lemah. Nelayan masih menghadapi dominasi tengkulak dalam sistem pemasaran hasil tangkapan yang menyebabkan posisi tawar mereka rendah dan harga jual ikan sering tidak menguntungkan. Selain itu, aktivitas industri pertambangan di wilayah pesisir turut memberikan tekanan terhadap ruang tangkap dan keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi *maintaining* dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kolonodale masih lebih banyak berfokus pada aspek internal, seperti penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok, dibandingkan perlindungan terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan usaha nelayan. Akibatnya, keberdayaan ekonomi yang telah dibangun melalui bantuan sarana produksi dan pelatihan masih rentan terhadap eksploitasi

pasar dan tekanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan yang lebih komprehensif, terutama dalam penguatan tata niaga perikanan, perlindungan wilayah tangkap nelayan, serta pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Kolonodale Kabupaten Morowali Utara telah dilaksanakan melalui berbagai program yang mencakup penyediaan sarana perikanan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelompok nelayan. Pada dimensi *enabling*, pemerintah telah berupaya menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan nelayan melalui penyediaan fasilitas, akses informasi, dan program bantuan, meskipun partisipasi nelayan dalam pengambilan keputusan masih belum optimal. Pada dimensi *empowering*, program pemberdayaan telah meningkatkan kapasitas dan produktivitas sebagian nelayan melalui pelatihan, bantuan sarana produksi, dan dukungan perlindungan sosial, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh nelayan. Sementara itu, pada dimensi *maintaining*, upaya menjaga keberlanjutan hasil pemberdayaan telah dilakukan melalui monitoring, penguatan kelembagaan, dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, tetapi perlindungan terhadap nelayan kecil dan keberlanjutan kemandirian usaha masih menghadapi berbagai kendala.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Kolonodale telah berjalan, namun belum optimal. Penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas nelayan, serta perlindungan yang lebih efektif bagi nelayan kecil diperlukan agar tujuan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian nelayan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Nur Alamsyah dan bapak Angga Pradana atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Amali, L.N., Gani, H. and Katili, M.R. (2022) "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan SDM Melalui Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(4), pp. 727–738. Available at: <https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i4.12215>.
- ARDANI, G. (2023) *KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DAERAH PESISIR (Studi Kasus Di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM. Available at: <https://repository.ummat.ac.id/6514/1/SKRIPSI%20GILANG%20FAKHRI%20RAMADHAN.pdf>.

- Irawati, Pageno, I. and Sisrilnardi (2025) "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bahodopi," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 41–57.
- Lingkua, C.L., Sasterio and Pradana, A. (2025) "Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 398–411.
- Lubys, M.A.A., Rares, J.J. and Plangiten, N.N. (2021) "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN BIBIT CENGKIH DAN BIBIT IKAN AIR TAWAR DI DESA MODAYAG TIMUR KECAMATAN MODAYAG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR," *JAP*, 7(105), pp. 60–67.
- Mamentu, M. (2015) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP DI KOTA MANADO," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(2), pp. 53–59.
- Manaf, C.Y. (2021) "EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), pp. 1238–1251. Available at: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i4.808>.
- Margayaningsih, D.I. (2018) "PERAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA," 11(8), pp. 72–88.
- Mashita, P., Mahfuzat and Abdi, fahmi S. (2024) "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PARALAYANG WAYU DI KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2, pp. 31–40.
- Noor, M. (2011) "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT," *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), pp. 87–99.
- Pratiyudha, P.P. *et al.* (2022) "Collective Capability in Urban Community Empowerment: Analysis of Kelompok Usaha Bersama in Yogyakarta City," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 6(2), pp. 155–180. Available at: <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.062-02>.
- Purnamasari, S.D. and Ma'ruf, M.F. (2020) "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi BUNDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Ngajuk)," *Jurnal publika*, 8(5), pp. 1–11.
- Rakhmadian, B. and Arif, L. (2023) "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA 'NGINGAS MAKMUR ABADI' DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO," *Journal Publicuho*, 6(4), pp. 1251–1261. Available at: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.252>.
- Rifaldi, M., Rusdin, R. and Mahfuzat (2026) "PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2(1), pp. 58–77.
- Solihati, T.A. *et al.* (2026) "Pemberdayaan Masyarakat Desa Cilolohan: Optimalisasi Potensi Lokal melalui Pendekatan Edukatif dan Partisipatif," *Journal of Empowerment Community*, 8(2), pp. 317–326.
- Suherman, E. *et al.* (2024) "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa

- Wisata Pada Wisata Sontoh Laut Asemrowo Kota Surabaya,” *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(2), pp. 85–101.
- Susilowati, E., Suharma and Nainggolan, A. (2025) “PENUMBUHAN MOTIVASI DALAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA PANJALU KABUPATEN CIAMIS- JAWA BARAT,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 36–42.
- Syahwan, Mahfuzat and Lamading, H.A. (2026) “Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility PT Mineral Bumi Nusantara Untuk Pembangunan Desa Binaan Di Lahuafu,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 2(1), pp. 78–96.
- Tahir, S. (2021) “KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PADAELO,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), pp. 139–152. Available at: <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.164>.
- Wahida, N., Hartawan and Mahfuzat (2025) “PRAKTIK GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHAN BAHORURU DALAM PENYALURAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN MOROWALI,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 125–137.